



KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DOKUMEN PERUBAHAN RENJA 2022

DOCUMENT FOR CHANGING renja 2022



DINAS
KETENAGAKERJAAN DAN
TRANSMIGRASI
KAB. INHIL



JL. KERITANG NO. 47
TEMBILAHAN



0768 21678

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2022 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada Tahun 2022 yang memuat diantaranya yaitu tujuan, sasaran dan target capaian kinerja yang akan di capai pada Tahun 2022.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua unit kerja berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 secara konsisten. Selanjutnya, diharapkan dengan adanya dokumen Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir dapat memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja perencanaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Akhir kata, Dokumen Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini disusun dengan sebaik-baiknya dan semoga dapat menghasilkan perencanaan yang implementatif guna mendukung terwujudnya “Kejayaan Inhil Yang Semakin Maju, Bermartabat Dan Bermartabat”.

Temblahan, 2022

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGIRASI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Drs. H. M. THAHER, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621225 198703 1 002

DAFTAR ISI

halaman

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sitematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....
- 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan RENJA Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Ketenagakerjaan dan bidang Transmigrasi. Dan juga evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II yang mana Realisasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2022 secara keseluruhan telah berjalan dengan baik dimana capaian kinerja telah mencapai 43%, untuk selanjut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1981 tentang Pokok-pokok Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003

3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor : 645/Men/1985 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hubungan Industrial
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);Undang – undang Nomor 15 Tahun 1997 dan PP Nomor. 02 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419).
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.
16. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
17. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023
18. **Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2020** Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
19. Perbub Indragiri Hilir No. 8 Tahun 2021 Tentang RKPD Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir 2022 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi, tata ruang dan keberhasilan selama 1 (satu) tahun ke depan.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKIP);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

- d) Untuk menjamin tercapainya mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
- e) Untuk menjamin terciptanya sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel.
- f) Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ketransmigrasian yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja Program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022.

Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah sampai dengan tahun 2021 dan pencapaian Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi RENJA Tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Indragiri Hilir

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp (Juta)	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp (Juta)	
							K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	12	13	17		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(10+11)	(13)	(17)		
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					-										
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA					6.336,16		934,13	1.464,40	1.168,96	1.655,00					
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP	Nilai	19	5.274,96		831,94	1.346,21	1.000,30		1.065,60	0	4244,044			
	2.07.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	4	77,04											
			Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang	laporan	5	-		4,30	10,35	9,91		31,70	0	56,2525			
	2.07.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	4	47,21	1	4,30	9,55	1	9,61	19,82	4	43,2725	DISNAKERTRANS		
	2.07.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	laporan	5	29,84	1	-	0,80	2	0,30	11,88	5	12,98	DISNAKERTRANS		
	2.07.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	orang	32	4.418,34		672,46	1.116,02		770,66	839,66	0	3398,797			
	2.07.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji ASN	Tahun	1	4.418,34	1	672,46	1.116,02		770,66	839,66	2	3398,797	DISNAKERTRANS		
	2.07.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	jenis	3	356,71		74,71	99,40		116,07	91,16					
			Jumlah bahan bacaan yang disediakan	exp	50	-							3	381,3416			
			Jumlah bahan logistik kantor yang	jenis	9	-							0	0			
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	2	-							0	0			
			Jumlah jenis pelatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	4	-							0	0			
			Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi	persen	100	-							0	0			
	2.07.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	jenis	3	2,93	3	1,38	-	3	0,60	0,95	3	2,9246	DISNAKERTRANS		
	2.07.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	4	17,10			4,00	3	6,80	6,00	4	16,8	DISNAKERTRANS		
	2.07.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	9	29,28	9	7,78	12,30	9	7,78	1,15	9	29,005	DISNAKERTRANS		
	2.07.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	jenis	2	10,01	2	1,88	0,50	2	26,63	- 18,42	2	10,579	DISNAKERTRANS		
	2.07.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	50	5,00			5,00		-	-	50	5	DISNAKERTRANS		
	2.07.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	77	292,39	14	63,67	77,60	19	74,26	101,49	77	317,033	DISNAKERTRANS		

	2.07.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	persen	100	351,42		75,20		77,97		89,67		91,79	0	334,625	
			Jumlah Rekening yang dibayarkan	rekening	3	-									0	0	
			Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	orang	11	-									0	0	
			Persentase ketersediaan jasa penunjangopersinal kantor	persen	100	-									0	0	
	2.07.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	persen	100	153,86	24	36,06	23	34,91	26	40,12	26,88	42,72	100	153,812	DISNAKERTRANS
	2.07.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	3	52,80	3	2,51	3	9,11	3	12,55	3	11,90	3	36,056	DISNAKERTRANS
	2.07.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang	11	144,76	11	36,64	11	33,95	11	37,00	11	37,17	11	144,757	DISNAKERTRANS
	2.07.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	71,45		5,27		42,48		13,99		11,29	0	73,028	
			Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	unit	12	-									0	0	
			Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	unit	17	-									0	0	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	20	-									0	0	
			Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	persen	100	-									0	0	
	2.07.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit	11	11,00	4	5,27	2	1,39	3	2,50	6	6,80	11	15,955	DISNAKERTRANS
	2.07.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit	8	8,00		-		-	3	1,52	5	3,19	8	4,708	DISNAKERTRANS
	2.07.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	13	12,50		-	4	4,19	7	6,93	2	1,30	13	12,415	DISNAKERTRANS
	2.07.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	39,95		-	2	36,90		3,05		-	2	39,95	DISNAKERTRANS
Rata-rata capaian kinerja (%)														9,0294	249,6497		
Predikat kinerja														SR	ST		

	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen	100	223,77		46,55		37,62	100	71,93		65,93	100	222,026		
	2.07.03.02.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan berbasis Kompetensi	orang	20	223,77		46,55		37,62	20	71,93		65,93				
	2.07.03.02.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kompetensi	orang	20	223,77		46,55		37,62	20	71,93		65,93	20	222,026	DISNAKERTRANS	
<i>Rata-rata capaian kinerja (%)</i>															20	222,026		
<i>Predikat kinerja</i>															SR	ST		
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	75	554,92		23,14		36,33		33,72		394,23	0	487,416		
	2.07.04.02.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja	orang	3000	554,92	30	23,14	1400	36,33	1200	33,72	370	394,23	3000	487,416		
			Jumlah pencari kerja yang terserap	orang	300	-									0	0		
			Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam bentuk kelompok kerja	orang	300	-									0	0		
	2.07.04.02.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Orang	3000	69,60	30	11,31	1400	20,89	1200	16,46	370	31,66	3000	17	DISNAKERTRANS	
	2.07.04.02.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam bentuk kelompok kerja sementara	Orang	300	485,32		11,83		15,44		17,26	300	425,89	300	470,416	DISNAKERTRANS	
<i>Rata-rata capaian kinerja (%)</i>															1260	194,9664		
<i>Predikat kinerja</i>															ST	ST		
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	100	282,50		32,50	7,7	44,25	15,4	63,01	15,38	129,24	38,46	269,004		
			Persentase Kasus yang diselesaikan denga Perjanjian Bersama (PB)	persen	50	-			7,7		15,4		15,38		38,46	0		
	2.07.05.02.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan di Kab. Inhil	kasus	10	282,50		32,50		44,25		63,01		129,24				
							1		3				4		13	269,004		
	2.07.05.02.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir	kasus	10	60,00		5,65		12,74		8,65		32,23			DISNAKERTRANS	
							1		3		5		4		13	59,266		
	2.07.05.02.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Survey KHL yang dilakukan	Kali	3	100,00		9,19		18,53		35,15		32,12	4	94,983	DISNAKERTRANS	
	2.07.05.02.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan	Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar di jamsostek	Orang	40701	122,50		17,67		12,98		19,21		64,89	40701	40701	114,755	DISNAKERTRANS
<i>Rata-rata capaian kinerja (%)</i>															8153,9	107,6016		
<i>Predikat kinerja</i>															ST	ST		

	3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				-											
	3.032.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				305,00											
	3.032.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	persen	100	241,16											
							13	21,21	28,9	39,69	28,9	70,24	28,89	97,76	100	228,899	
	3.032.03.02.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/laporan kondisi sarana prasarana wilayah transmigrasi	laporan	1	241,16											
			Jumlah dokumen pengelolaan penempatan transmigrasi	dokumen	1	-									0	0	
			Jumlah lokasi transmigrasi yang dikelola	lokasi	1	-									0	0	
			Jumlah lokasi yang diberikan penyuluhan/pengarahan	lokasi	1	-									0	0	
			Jumlah warga transmigrasi yang dibina	orang	225	-									0	0	
	3.032.03.02.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah dokumen/laporan kondisi sarana prasarana wilayah transmigrasi	Laporan	1	40,00											DISNAKERTRANS
							1	-		10,57		2,90		21,45	1	34,915	
	3.032.03.02.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Transmigrasi yang dikelola	Lokasi	1	50,00											DISNAKERTRANS
								6,51		5,95		16,32		21,16	0	49,94	
	3.032.03.02.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah lokasi yang diberikan penyuluhan/pengarahan	Lokasi	1	120,00											DISNAKERTRANS
							1	12,69	1	18,13	1	45,87	1	43,00	1	119,694	
	3.032.03.02.01.07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang dibina	KK	225	31,16											DISNAKERTRANS
							30	2,01	65	5,04	65	5,15	65	12,15	225	24,35	
Rata-rata capaian kinerja (%)															25,333	50,86644	
Predikat kinerja															SR	SR	
	3.032.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	Persen	100	63,84											
								-	33,3	14,86	33,3	16,65	33,34	16,86	100	48,37	
	3.032.04.02.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah lokasi Transmigrasi yang dikelola	lokasi	1	63,84											
								-	1	14,86		16,65		16,86	1	48,37	
			Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pengarah	orang	225	-									0	0	
			Jumlah warga transmigrasi yang mengelola prasarana, sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	orang	225	-									0	0	
	3.032.04.02.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pengarah	orang	225	30,59											DISNAKERTRANS
								-	75	7,05	75	6,24	75	8,08	225	21,37	
	3.032.04.02.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah warga transmigrasi yang mengelola prasarana, sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	orang	225	33,25											DISNAKERTRANS
								-	75	7,81	75	10,41	75	8,78	225	27,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)															90,2	19,348	
Predikat kinerja															T	SR	
Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program :										955,3416	1518,953	1255,846	1769,619				
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program :														1593,08	140,74		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program :														ST	ST		
Faktor pendorong keberhasilan ki: Komitmen semua pemangku kepentingan																	
Faktor penghambat pencapaian ki: (1) Pandemi Covid-19 (2) Kesalahan Penentuan Target Kinerja																	
Tindak lanjut yang diperlukan dal: Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan program untuk mengejar keterlambatan pencapaian target pada triwulan selanjutnya																	
Tindak lanjut yang diperlukan dal: Perlu dilakukan penyesuaian RKPD dengan APBD Tahun 2021																	

Tabel 2.2
Evaluasi Renstra Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	(Rp)	TW I		TW II		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		K	(Rp)
						K	(Rp)	K	(Rp)									
1	2	3	4	7		8		9		10 = 9 + 8		11		12		13		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			6.489,59												DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	5.574,59		895,66		1.377,40		2273,06			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	pesen	100	58,35		-	55,43	32,35	55,43	32,35			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	7	31,93	2	-	3	18,98	5	18,98		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	dokumen	5	26,42	1	-	2	13,37	3	13,37		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	persen	100	4.469,59	15	667,85	22	1.002,91	37	1670,75			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	32	4.469,59	32	667,85	32	1.002,91	32	1670,75		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	perse	100	370,74	28	102,30	37	136,02	64	238,32			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	jenis	6	5,31	2	1,50	8	7,38	10	8,88		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	2	13,55	0	-	2	13,55	2	13,55		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	8	43,01	2	8,60	4	18,90	6	27,50		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	jenis	2	16,30	1	6,36	1	6,10	2	12,46		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	exampler	50	80,00	0	-	3,125	5,00	3	5,00		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	kali	47	212,57	19	85,84	19	85,10	38	170,94		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	

2	7	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	persen	100	576,70	20	113,72	27	157,71	47	271,43						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	persen	100	215,86	26	55,21	36	77,54	62	132,75						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	rekening	3	139,44	3	11,71	3	13,02	3	24,73						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	orang	13	221,40	13	46,80	13	67,15	13	113,95						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	persen	100	99,22	12	11,80	49	48,41	61	60,21						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		27	19,00	5	3,75	15	9,95	20	13,70						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara		14	10,00	0	-	0	-	0	0,00						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	53	15,97	27	8,05	31	9,21	58	17,26						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2	54,25	0	-	1	29,25	1	29,25						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
												Rata-rata capaian kinerja (%) :		69	62,91					
												Predikat kinerja :		ST	ST					
2	7	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen	100	165,00		11,88		22,73		34,61						DINAS KEIENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Cakupan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan	persen	100	165,00		11,88		22,73	0	34,61						DINAS KEIENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	2.01.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kompetensi	orang	5	124,68	0	2,19	0	19,68	0	21,86						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	2.01.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kerjasama antar lembaga/sector swasta untuk menyediakan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja		6	40,32	2	9,70	2	3,05	4	12,75						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
												Rata-rata capaian kinerja (%) :		17	24,58					
												Predikat kinerja :		SR	SR					
2	7	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	persen	85	600,00		6,62		161,14		167,76					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Informasi Pasar kerja	persen	100	600,00		6,62	0	161,14		167,76						DINAS KEIENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	2.01.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja	orang	3000	40,00	600	-	900	19,48	1500	19,48						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	2.01.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap dalam Bentuk Kelompok Kerja	orang	180	560,00	0	6,62	40	141,66	40	148,28						DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
												Rata-rata capaian kinerja (%) :		40	37,58					
												Predikat kinerja :		T	S					

2	7	5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	100	150,00	20	15,93	20	36,91	40	52,83					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Jumlah Perselisihan Hunungan Industrial	persen	90	150,00	20	15,93	20	36,91	40	52,83					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir	kasus	10	40,00	2	13,18	2	9,60	4	22,78				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey KHL yang dilakukan	kali	10	70,00	1	2,75	2	13,79	3	16,54				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsotek		100	40,00	0	-	34	13,52	34	13,52				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
												Rata-rata capaian kinerja (%) :		36	35,22				
												Predikat kinerja :		R	R				
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				200,00											DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3	32	3		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi	persen	100	263,36	12,94	34,07	42,5	111,93	55	145,99					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan penempatan transmigrasi	dokumen	1	263,36		34,07	1	111,93	1	145,99					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	2.01	2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah dokumen/laporan kondisi sarana prasarana wilayah transmigrasi		1	32,85	0	-	1	12,33	1	12,33				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	2.01	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi transmigrasi yang dikelola	lokasi	1	163,11	0	28,78	1	61,26	1	90,04				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	2.01	5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah lokasi yang diberikan penyuluhan/pengarahan		1	34,00	0	3,55	1	25,79	1	29,34				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	2.01	7	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pengarahan tentang Peningkatan SDM	orang	225	33,40	45	1,74	56,25	12,55	101	14,29				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
												Rata-rata capaian kinerja (%) :		60	55,45				
												Predikat kinerja :		ST	ST				
3	32	4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	persen	100	66,60	2,40	1,60	25,11	16,72	27,51	18,32					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3	32	4	2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah lokasi Transmigrasi yang dikelola	lokasi	1	66,60	1	1,60	1	16,72	1	18,32					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3	32	4	2.01	1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pengarahan tentang Peningkatan SDM	orang	225	33,30	33,75	0,80	33,75	8,49	68	9,29				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3	32	4	2.01	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah warga transmigrasi yang mengelola prasarana, sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	orang	225	33,30	33,75	0,80	33,75	8,23	68	9,03				DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
												Rata-rata capaian kinerja (%) :		30	27,51				
												Predikat kinerja :		R	R				
												Rata-rata capaian kinerja Seluruh Program (%) :		43	41,02				
												Predikat kinerja :		T	T				

Dari Tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten Kota telah terlaksana dengan baik dimana realisasi kinerjanya sampai dengan triwulan II telah mencapai sekitar 60%, sementara untuk program pelatihan kerja produktivitas tenaga kerja masih sangat rendah dimana capain kinerja pada program ini masih sangat rendah dimana untuk capain kinerja baru 17 % hal ini dikarena belum dilaksanakan sub kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelataihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi dimana kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan IV. Untuk kegiatan Penempatan Tenaga Kerja sebagian telah dilaksanakan dimana dapat dilihat dari realisasi kinernya sudah mencapai 40%, sementara untuk Program Hubungan Industrial masih rendah dimana realisasi kinerja masih mencapai 36%, hal ini dikarenakan kegiatannya baru sebagian kecil saja baru dilaksanakan, dimana sub kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota baru 2 (dua) kasus yang tedata sampai dengan triwulan II pada tahun 2022 ini, untuk survei KHL baru 2 kali melaksanakan survey KHL, dan untuk laporan jaminan sosial belum ada melaporkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi sudah dilaksanakan dengan baik dimana hasil capaian kinerjanya sudah mencapai 60% sampai dengan triwulan II ini dan untuk program Pengembangan Kawasan Transmigrasi masih rendah dimana capian kinerjanya baru mencapai 30% dimana kegiatan ini baru dilaksanakan sebagian yang rencananya akan dilanjutkan pada Triwulan III dan Triwulan IV. Akan tetapi secara kekeluruhan capaian kinerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir sudah tinggi dimana capaian kinerjanya mencapai 43 % (empat puluh tiga persen).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

Analaisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir didasasrkan pada kajian capaian kinerja palayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir

NO	Indikator	Satuan	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen			96,86	97,14	97,14	97,14	95,65	68,56	68,56	68,56	
2.	Persentase Pencari Kerja Terlatih	Persen	√	√	55,67	27,68	27,68	27,68	33,16	27,68	27,68	27,68	
3.	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persen	√	√	48	85	86	87	4				
4.	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang ditangani	Kasus		√	14	13	13	13	10	13	13	13	
5.	Jumah Transmigrasi ditangani	KK		√	225	225	225	225	225	225	225	225	
6.	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang			85	80	80	80	85				
7.	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	√	√	59	48,00	48,00	48,00	30	46,15	46,15	46,15	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari tabel berikut dapat dilihat Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 5 (lima) masalah pokok dan 5 (lima) masalah dan ada 6 (enam) akar masalah yang akan menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan capaian program dan pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 2.4
Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja	Banyaknya pencari kerja yang tidak tamat sekolah	Sebagian pencari kerja putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya
2	Rendahnya kualitas tenaga kerja	Pencari kerja banyak yang tidak memiliki keterampilan/keahlian	Sebagian pencari kerja tidak memiliki keterampilan/ keahlian dibidangnya, termasuk tenaga kerja PMI
3	Besarnya jumlah pengangguran disebabkan karena tidak seimbangnya peningkatan jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja.	Hal ini disebabkan kualifikasi kompetensi pencari kerja pada umumnya belum sesuai dengan persyaratan kerja (job requirement) yang ditentukan atau yang dibutuhkan oleh pasar kerja	Ketidaksesuaian antara kualifikasi kompetensi tenaga kerja dengan persyaratan kerja disebabkan karena angkatan kerja yang akan memasuki dunia kerja belum memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja yang memadai dan juga masih minimnya informasi yang diperoleh tentang dunia kerja maupun informasi pasar kerja.
4	Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	Pekerja tidak terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan/ BPJS Ketenagakerjaan	Ada beberapa perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja ke BPJS kesehatan dan ditemukan perusahaan hanya mendaftarkan sebagian program BPJS ketenagakerjaan.
5	Pendapatan warga Transmigrasi Belum Maksimal / dibawah standar	Warga tidak maksimal menggarap lahan dan menggunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah	Sebagian lahan warga belum dibagikan khususnya untuk 146 KK lahan II belum terbagikan
			Sebagian lahan warga sering banjir/ tergenangan karena pendangkalan kanal

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan Review terhadap Rancangan Awal RKPD dimana Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir. Rencana Kerja Tahun 2022 juga dirumuskan untuk mensinkronkan dalam rangka menunjang visi, misi kepala daerah dengan program dan kegiatan yang mengakomodir urusan pelayanan dasar

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah daerah pada tahun 2022.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2022 dapat dilihat dari Tabel T-C.31 berikut ini :

Tabel 2.5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA		Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	22 Nilai		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA		Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	22 Nilai	6,489.59	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	7 Dokumen	25.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100 persen	58.35	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	5 Laporan	63.80	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	7 dokumen	31.93	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	5 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	5 dokumen	26.42	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100 persen	4,469.59	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100 persen	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	32 orang	4,469.59	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	148 Buah	5.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	100 perse	370.74	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	1 Unit	5.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 jenis	5.31	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4045 Liter	40.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 jenis	13.55	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	59837 Lbr/bh/blok/exp	24.72	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 jenis	43.01	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	99 Eksemplar	20.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	2 jenis	16.30	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	943 Kali	18.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	50 exampler	80.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	47 kali	212.57	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	1500 Lembar	3.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	100 persen	576.70	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening yang dibayarkan	100 persen	215.86	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Rekening yang dibayarkan	4 Rekening	60.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	3 rekening	139.44	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	13 Ruang	41.60	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	13 orang	221.40	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	17 Unit	13.30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	100 persen	99.22	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	17 Unit	13.30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	27 unit	19.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	9.80	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	14 unit	10.00	
									53 unit	15.97	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 Ruang	50.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	54.25
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	100 Persen		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	100 Persen	165.00
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Cakupan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Cakupan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan	100 persen	165.00
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kompetensi	24 orang	55.00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kompetensi	5 orang	124.68
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kerjasama antar lembaga/ sektor swasta untuk menyediakan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	3 Orang	75.00	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kerjasama antar lembaga/ sektor swasta untuk menyediakan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	6 kali	40.32
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	85 persen		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	85 persen	600.00
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Informasi Pasar Kerja			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Informasi Pasar Kerja	100 persen	600.00
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penerbitan Perpanjangan IMTA			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penerbitan Perpanjangan IMTA	100 persen	-
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja	6896 Orang/Lembar	85.00	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja	3000 orang	40.00
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100 Persen		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100 Persen	150.00
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penurunan Jumlah Perselisihan Hunungan Industrial			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penurunan Jumlah Perselisihan Hunungan Industrial	90 persen	150.00
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir	9 kasus	48.00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir	10 kasus	40.00
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah survey KHL yang dilakukan	1 Kali	65.00	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah survey KHL yang dilakukan	10 kali	70.00
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsotek	24 Orang	48.00	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsotek	100 persen	40.00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				200.00
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Cakupan bina transmigrasi	100 persen		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Cakupan bina transmigrasi	100 persen	133.40
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengelolaan penempatan transmigrasi			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengelolaan penempatan transmigrasi	1 dokumen	133.40
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	Jumlah dokumen/laporan kondisi sarana prasarana wilayah transmigrasi	1 Laporan	33.00	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	Jumlah dokumen/laporan kondisi sarana prasarana wilayah transmigrasi	1 laporan	32.85
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	Jumlah lokasi transmigrasi yang dikelola	1 Lokasi	33.00	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	Jumlah lokasi transmigrasi yang dikelola	1 lokasi	33.16
	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	Jumlah lokasi yang diberikan penyuluhan/pengarahan	1 Lokasi	33.00	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	Jumlah lokasi yang diberikan penyuluhan/pengarahan	1 lokasi	34.00
	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pengarahan tentang Peningkatan SDM	374 KK	33.00	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pengarahan tentang Peningkatan SDM	225 orang	33.40
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	100 persen		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	100 persen	66.60
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		Jumlah lokasi Transmigrasi yang dikelola			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		Jumlah lokasi Transmigrasi yang dikelola	1 lokasi	66.60
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pengarahan tentang Peningkatan SDM	374 KK	33.00	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pengarahan tentang Peningkatan SDM	225 orang	33.30
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	Jumlah warga transmigrasi yang mengelola prasarana, sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	8 kelompok	62.00	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	Jumlah warga transmigrasi yang mengelola prasarana, sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	225 orang	33.30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG kecamatan dalam Forum OPD sebagai berikut :

1. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi: Uulan Pelatihan Menjahit dari Khairah Mandah Kec.Mandah, Pelatihan Pengolahan Bahan Baku untuk Usaha Kecil Desa Pekan Kamis Kec. Tembilahan Hulu, Pelatihan Nyetir Mobil Desa Pekan Kamis Kec. Tembilahan Hulu, pelatihan Menjahit Desa Teluk Sungka Kec. Gaung Anak Serka, Pelatihan Menjahit untuk Ibu-ibu PKK Desa Lintas Utara Kec. Keritang, Pelatihan Menjahit Kelompok Beringin Sentosa Dusun Sentosa Kec. Keritang, Pelatihan Menjahit Dusun Kelapa Kec. Keritang Pasar Kembang, Pelatihan Komputer Desa Kemuning Muda Kec. Kemuning, Pelatihan Menjahit ibu-ibu PKK Teluk Kelasa, Kec. Keritang, Pelatihan Menjahit Desa Bakau Aceh Kec. Mandah, Pelatihan Perbengkelan Dusun Mekar Serumpun Kec. Kempas, Pelatihan Teknisi Komputer/Laptop dan HP Kelompok Usaha Bersama Koper Desa Teluk Medan Kec. Enok, Pelatihan Menjahit/Bordri Kec. Gaung Anak Serka, Pelatihan Perbengkelan Ke. Tempuling
2. Sub. Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja: Pembuatan Badan Jalan Lintas Kec. Pulau Burung Desa Suka Jaya

Akan tetapi pada tahun 2022 ada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir tidak mengakodindir usulan program dan kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia. Berikut Tabel TC-32 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 pada Dinas Keteangakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Indragiri Hilir
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir

Kode	Program / Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2				3	4	5	6
2								
2	07							1.176.634.400
2	07	01			Kab. Inhil	Rata-rata Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		1.176.634.400
2	07	01	2.01		Kab. Inhil	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar		46.415.000
2	07	01	2.01	01	Kab. Inhil	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen	23.255.000
2	07	01	2.01	06	Kab. Inhil	Jumlah laporan SKPD yang disusun	5 laporan	23.160.000
2	07	01	2.06		Kab. Inhil	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Koordinasi	100 Persen	459.890.000
2	07	01	2.06	01	Kab. Inhil	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	6 jenis	9.306.000
2	07	01	2.06	02	Kab. Inhil	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	13.550.000
2	07	01	2.06	04	Kab. Inhil	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	8 jenis	47.005.000
2	07	01	2.06	05	Kab. Inhil	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 jenis	29.930.000
2	07	01	2.06	06	Kab. Inhil	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	40 exp	5.000.000
2	07	01	2.06	09	Kab. Inhil	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	47 kali	355.099.000
2	07	01	2.08		Kab. Inhil	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100%	508.114.400
2	07	01	2.08	01	Kab. Inhil	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan surat Menyurat	100%	244.860.000
2	07	01	2.08	02	Kab. Inhil	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3 rekening	56.040.000
2	07	01	2.08	04	Kab. Inhil	Jumlah Tenaga Pelaksana yang dibayarkan	13 orang	207.214.400

2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kab. Inhil	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang Terpelihara	100%	162.215.000
2	07	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Inhil	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/ Operasional/ Lapangan yang di pelihara	27 unit	35.000.000
2	07	01	2.09 02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operaional atau Lapangan	Kab. Inhil	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/ Operasional/ Lapangan yang di pelihara	14 unit	10.000.000
2	07	01	2.09 06	Pemeliharaan peraltan dan Mesin Laninnya	Kab. Inhil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	53 unit	57.965.000
2	07	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Inhil	Jumlah Gedung Kantor atau Bangnan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	59.250.000
2	07	03		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Inhil	Peresentase Tenaga Kerja yg Mendapatkan Pelatihan	100	391.170.000
2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Inhil	Jumlah Peserta yang Mengikuti pelatuhan Berbasis Kompetensi	20 orang	391.170.000
2	07	03	2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Inhil	Jumlah Peserta yang Mengikuti pelatuhan Berbasis Kompetensi	20 orang	274.684.000
2	07	03	2.01 02	Koordinasi Lintas Lembaga danKerja Sama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Perencana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Inhil	Jumlah kerjasama antar lembaga/Sektor swasta untuk menyediakan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	6 kali	116.486.000
2	07	04		Program Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Inhil	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	75%	717.001.000
2	07	04	2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota	Kab. Inhil	Besaran Tenaga Kerja yang ditempatkan	75%	717.001.000
2	07	04	2.01 01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Kab. Inhil	Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar	3000 orang	31.880.000
2	07	04	2.01 01	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Inhil	Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam bentuk kelompok kerja sementara	300 orang	685.121.000
2	07	05		Program Hubungan Industrial		Persentase Kasus yg Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	168.620.000
2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota		Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan di Inhil	10 kasus	168.620.000
2	07	05	2.02 01	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Inhil	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar di Jamsostek	40701 orang	29.430.000
2	07	05	2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Inhil	Jumlah Survey KHL yang dilakukan	3 kali	86.310.000
2	07	05	2.02 06	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Kab. Inhil	Jumlah Kasus Ketenagakejraan yang ada di Kab. Inhil	10 kasus	52.880.000

[Type the document title]

3					URUSAN PEMEINTAH PILIHAN					326.835.000
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN KAWASAN TRANSMIGRASI					326.835.000
3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi			Cakupan Bina Transmigrasidan Penempatan Transmigrasi Lokal	100%	278.215.000
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Bearasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen/Laporan yang dikelola	1	278.215.000
3	32	03	2.01	02	Penyeiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Desa Tjg Melayu Kec. Kundra		Jumlah dokumen/Laporan kondisi sarana dan prasraan wilayah transmigrasi	1 laporan	23.260.000
3	32	03	2.01	04	Pemeindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Desa Tjg Melayu Kec. Kundra		Jumlah lokasi transmigrasi yang dikelola	1 lokasi	163.110.000
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Desa Tjg Melayu Kec. Kundra		Jumlah lokasi transmigrasi yang diberikan penyuluhan/pengerahan	1 lokasi	65.785.000
3	32	03	2.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmgirasi di Kawasan Transmigrasi	Desa Tjg Melayu Kec. Kundra		Jumlah warga transmigrasi yang dibina	225 orang	26.060.000
3	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi			Cakupan Bina Transmigrasidan Penempatan Transmigrasi Lokal	100%	48.620.000
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian			Jumlah warga transmigrasi ygn diberikan pengerahan	225 orang	48.620.000
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Desa Tjg Melayu Kec. Kundra		Jumlah Warga Transmigrasi yang diberikan pengerahan	225 orang	24.510.000
3	32	04	2.01	01	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Desa Tjg Melayu Kec. Kundra		Jumlah warga transmigrasi yang mengelola prasarana sarana sosial dan Ekonommi di kawasan Transmigrasi	225 orang	24.110.000
Total										2.780.260.400

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendaan Perangkat Daerah

Pada tahun 2022 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Indragiri Hilir telah membuat rencana kerja dan pendaan perangkat daerah dimana untuk urusan ketenagakerjaan ada 3 program yakni Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Hubungan Industrial sedangkan Urusan Pemerintahan Kawasan Transmigrasi ada dua program yaitu Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Rencana Kerja dan Pendaan Perangkat Daerah Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Indragiri Hilir
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2.453.425.400				9.988.000.000
2 07 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rata-rata Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Kab. Inhil		1.176.634.400	PAD			5.028.000.000
2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Kab. Inhil		46.415.000	PAD			350.000.000
2 07 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Kab. Inhil	7 Dokumen	23.255.000	PAD		7 Dokumen	200.000.000
2 07 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan SKPD yang disusun	Kab. Inhil	5 laporan	23.160.000	PAD		17 laporan	150.000.000
2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Koordinasi	Kab. Inhil	100 Persen	459.890.000	PAD		100 Persen	1.980.740.000
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Kab. Inhil	6 jenis	9.306.000	PAD		6 Jenis	55.000.000
2 07 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Inhil	2 jenis	13.550.000	PAD		10 Jenis	942.740.000
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Inhil	8 jenis	47.005.000	PAD		8 Jenis	85.000.000
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kab. Inhil	2 jenis	29.930.000	PAD		2 Jenis	75.000.000
2 07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratruan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Kab. Inhil	40 exp	5.000.000	PAD		50 Exp	20.000.000
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kab. Inhil	47 kali	355.099.000	PAD		62 Kali	803.000.000

2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Kab. Inhil	100%	508.114.400	PAD		100%	1.217.260.000
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan surat Menyurat	Kab. Inhil	100%	244.860.000	PAD		100 Persen	335.860.000
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Kab. Inhil	3 rekening	56.040.000	PAD		3 rekening	350.000.000
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelaksana yang dibayarkan	Kab. Inhil	13 orang	207.214.400	PAD		28 Orang	531.400.000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang Terpelihara	Kab. Inhil	100%	162.215.000	PAD		100 persen	910.000.000
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/ Operasional/ Lapangan yang di pelihara	Kab. Inhil	27 unit	35.000.000	PAD		10 Unit	50.000.000
2	07	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operaional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/ Operasional/ Lapangan yang di pelihara	Kab. Inhil	14 unit	10.000.000	PAD		14 Unit	25.000.000
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan peraltan dan Mesin Laninnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Inhil	53 unit	57.965.000	PAD		32 Unit	35.000.000
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangnan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kab. Inhil	2 unit	59.250.000	PAD		2 Unit	800.000.000
6	01	01	2.07		Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Kab. Inhil		-	PAD		100 persen	570.000.000
6	01	01	2.07	02	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	Kab. Inhil		-	PAD		5 Unit	570.000.000
2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peresentase Tenaga Kerja yg Mendapatkan Pelatihan	Kab. Inhil	100	391.170.000	PAD		100	2.383.000.000
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta yang Mengikuti pelatuhan Berbasis Kompetensi	Kab. Inhil	20 orang	391.170.000	PAD		20 orang	2.383.000.000
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta yang Mengikuti pelatuhan Berbasis Kompetensi	Kab. Inhil	20 orang	274.684.000	PAD		20 Orang	1.967.781.000
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan	Jumlah kerjasama antar lembaga/Sektor swasta untuk menyediakan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kab. Inhil	6 kali	116.486.000			2 Kali	415.219.000

2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Kab. Inhil	75%	717.001.000	PAD		6,87	2.501.000.000
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota	Besaran Tenaga Kerja yang ditempatkan	Kab. Inhil	75%	717.001.000	PAD		6,87	2.501.000.000
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar	Kab. Inhil	3000 orang	31.880.000	PAD		85 orang	217.981.600
2	07	04	2.01	01	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam bentuk kelompok kerja sementara	Kab. Inhil	300 orang	685.121.000	PAD		330 Orang	2.283.018.400
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus yg Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		50%	168.620.000	PAD		30 Persen	76.000.000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan di Inhil		10 kasus	168.620.000	PAD		10 Kasus	76.000.000
2	07	05	2.02	01	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar di Jamsostek	Kab. Inhil	40701 orang	29.430.000	PAD		40701 Orang	20.000.000
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Survey KHL yang dilakukan	Kab. Inhil	3 kali	86.310.000	PAD		1 kali	36.000.000
2	07	05	2.02	06	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang ada di Kab. Inhil	Kab. Inhil	10 kasus	52.880.000	PAD		10 Kasus	20.000.000
3					URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				326.835.000				101.000.000
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN KAWASAN TRANSMIGRASI				326.835.000				101.000.000
3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Bina Transmigrasidan Penempatan Transmigrasi Lokal		100%	278.215.000	PAD		100%	67.000.000
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Bearasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan yang dikelola		1	278.215.000	PAD		1	67.000.000
3	32	03	2.01	02	Penyeiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah dokumen/Laporan kondisi sarana dan prasaran wilayah transmigrasi	Desa Tjg Melayu Kec. Kundra	1 laporan	23.260.000	PAD		1 laporan	15.000.000
3	32	03	2.01	04	Pemeindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah lokasi transmigrasi yang dikelola	Desa Tjg Melayu Kec. Kundra	1 lokasi	163.110.000	PAD		1 lokasi	20.000.000
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang diberikan penyuluhan/pengerahan	Desa Tjg Melayu Kec. Kundra	1 lokasi	65.785.000	PAD		1 lokasi	15.000.000
3	32	03	2.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang dibina	Desa Tjg Melayu Kec. Kundra	225 orang	26.060.000	PAD		225 orang	17.000.000

3	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Bina Transmigrasidan Penempatan Transmigrasi Lokal		100%	48.620.000	PAD		100%	34.000.000
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah warga transmigrasi ygn diberikan pengerahan		225 orang	48.620.000	PAD		225 orang	34.000.000
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Warga Transmigrasi yang diberikan pengerahan	Desa Tjg Melayu Kec. Kundra	225 orang	24.510.000	PAD		225 orang	17.000.000
3	32	04	2.01	01	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah warga transmigrasi yang mengelola prasarana sarana sosial dan Ekonommi di kawasan Transmigrasi	Desa Tjg Melayu Kec. Kundra	225 orang	24.110.000	PAD		225 orang	17.000.000
					Total				2.780.260.400				10.089.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan Keteransmigrasian. Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Drs. H. M. THAHER, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19621225 198702 1 002